

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DI MASJID SYUHADA
MASAMBA BERDASARKAN PSAK 45**

Nasaruddin,¹⁾, Muh. Abdi Imam²⁾

¹⁾Tradis Matematika, FTIK, IAIN Palopo
E-mail: nasaruddin@iainpalopo.ac.id

²⁾Ekonomi Syariah, FEBI, IAIN Palopo
E-mail: Muh_abdi_imam@iain.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to determine how the form of the Masamba Syuhada Mosque's financial statements and the suitability of the financial statements prepared at the Masamba Syuhada Mosque with PSAK 45. The research methodology used in this study is interpretive qualitative with a case study approach. This study was conducted in the city of Masamba, Kab. North Luwu. The analysis technique utilized is logic analytic, which involves modifying numerous observations and interviews with the theory used, which is accounting and religion, good governance, and jurisdictional clashes. Only record the amount of entering and exiting cash, and financial statements are not prepared in line with PSAK 45 for non-profit businesses.

Keywords : *Accounting and theology, good governance, Clash Of Jurisdictional, Mosque Accounting, PSAK 45*

JEL Classification : *(sesuaikan dengan klasifikasi JEL)*

1. PENDAHULUAN

Allah SWT melalui Al Quran surat Al Baqarah 282 berfirman:

“ Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan.”

Surah Al-Baqarah ayat 282 diatas dipakai sebagai dasar pembukuan dalam islam yang kemudian berkembang sebagai dasar akuntansi. dalam ayat ini, Allah SWT hanya mengajarkan cara mencatat hutang-piutang. namun demikian ayat ini jangan hanya di takwilkan secara literal, yaitu peraturan mencatat hutang-piutang. melaingkan harus menggali dan memahami makna yang terkandung pada ayat itu sedalam-dalamnya. demikian pula dengan ayat 2:282-283, untuk memahami diperlukan pengetahuan

akuntansi (bahkan mungkin juga notariat dan ilmu sosial lainnya). Penggalan Surat Al Baqarah 282 tersebut diatas secara implisit memberikan pesan bahwa Islam mendorong praktik akuntansi dalam kehidupan bermuamalah (perdagangan). Pada dasarnya, ilmu akuntansi dan praktek akuntansi di lingkungan bisnis (muamalah) telah menjadi bagian yang integral. Namun, ilmu akuntansi dan prakteknya di luar entitas bisnis khususnya lembaga keagamaan sangat termarginalkan. Sebagai entitas pelaporan akuntansi yang menggunakan dana masyarakat sebagai sumber keuangannya dalam bentuk sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat (publik), masjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana

entitas tersebut berada yang berbeda dengan entitas publik lainnya.

Masjid merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba (non-profit oriented). Masjid sebagai sarana peribadatan dan kegiatan umat tentunya memerlukan sistem pelaporan keuangan yang efektif. Hal ini dikarenakan masjid juga memerlukan informasi yang dapat menunjang kegiatan peribadatan, kegiatan keagamaan, termasuk aktivitas perawatan dan pemeliharaan masjid. Selain itu, para pengelola masjid (takmir) juga memerlukan sistem pelaporan keuangan masjid yang akurat khususnya yang berhubungan dengan; 1) keadaan dan kondisi jamaah, 2) keadaan dan kondisi harta kekayaan dan keuangan masjid dan, 3) informasi lain yang diperlukan sehubungan dengan kepentingan masjid. Hal ini bertujuan untuk pertanggungjawaban kepada para pengurus dan jamaah masjid. Pengelolaan keuangan masjid yang baik, juga merupakan salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid. Hal ini dikarenakan, masjid juga memerlukan ketersediaan dana yang tidak sedikit setiap bulannya. Dana-dana tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan peribadatan, keagamaan, pengadaan sarana dan prasarana, dan pengembangan masjid. Ini merupakan tanggung jawab para pengurus masjid (takmir) untuk memikirkan, mencari, dan mengumpulkan dana untuk kepentingan masjid.

Masjid merupakan entitas publik dimana nilai-nilai spiritual Islam dikembangkan dan nilai-nilai spiritual tersebut seringkali tidak dapat berdamaikan dengan nilai-nilai materialisme lainnya yang biasa eksis pada entitas pelaporan akuntansi lainnya seperti perusahaan atau entitas sektor publik lainnya. (1993) dalam Dhaniel dan yeni (2011) menjelaskan bahwa, Pemisahan kehidupan spiritual dan keduniawian menempatkan akuntansi sebagai ilmu yang didasari oleh pemahaman sekuler, menyebabkan institusi keagamaan seperti gereja, hanya mentolelir peran akuntansi pada batas mendukung kegiatan spritual, tidak terintegrasi dalam mendukung tugas-tugas suci keagamaan. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, Akuntansi pada dasarnya adalah tools yang dapat

mendukung kinerja entitas dimana akuntansi itu dipraktekkan.

Populasi masjid dan umat muslim di Indonesia sangat banyak. Kepastian dana mengalir pun selalu ada. Namun, seringkali takmir masjid sebagai pengelola tidak mengetahui persis gambaran pengalokasian dana. Dana keluar masuk begitu saja. Oleh karena itu, harus ada alternatif agar pengelolaan keuangan masjid bisa berjalan efektif yaitu melalui proses aktivitas, sumber-sumber penerimaan, dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan anggaran berdasarkan aktivitas. Setiap masjid tentu memiliki aktivitas yang berbeda tergantung sumber daya, karakter masing-masing masjid dan permasalahannya

Diawali dari pengidentifikasian tersebut, nantinya akan muncul sumber dana. Diikuti dengan rencana penganggaran berdasarkan aktivitas yang sudah direncanakan. Tidak hanya sekedar pengelolaan rutinitas penyelenggaraan ibadah dalam hal kebersihan dan perlengkapan ibadah, pengelola masjid juga dituntut mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lebih, misalnya aktivitas kajian rohani, pendidikan keagamaan khusus, fasilitas kesehatan, dan fasilitas taman atau halaman masjid sebagai ruang serba guna (untuk acara akad nikah), serta lembagalembaga pendukung seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an, panitia zakat infaq dan sedekah, ikatan remaja masjid, peringatan hari besar islam, kunjungan ke masjid-masjid, manasik haji, out bound, tour santri, marawis, dan nasyid, donasi, atau lainnya. Bahkan pada masjid-masjid yang sudah besar dalam pengelolaannya yang sudah mengarah pada pengelolaan unit bisnis tertentu serta semakin kompleknya unit bisnis yang dikelola maka penyajian laporan keuangan akan menjadi suatu keharusan. Pada akhirnya laporan keuangan tersebut akan dipublikasikan secara transparansi, sehingga masyarakat akan lebih tenang dan percaya ketika menyumbangkan uangnya.

Masjid sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba ketergantungan pada donatur cukup tinggi, sehingga kepastian dana menjadi pertanyaan besar. Namun, di sisi lain, keikhlasan dari para donatur dan kepercayaan mereka lah yang menjadi nilai tambah bagi para organisasi

sektor publik. Kepercayaan itulah yang dapat menjadikan sumber daya atau uang menjadi mengalir dengan pasti ke dalam organisasi. Kepercayaan donatur inilah yang perlu dipelihara, bahkan ditingkatkan jika organisasi menginginkan kepastian serta peningkatan arus kas masuk. Bagaimana agar kepercayaan publik dapat meningkat dan senang mendermakan (mempercayakan) dananya kepada organisasi? Salah satu caranya adalah dengan menunjukkan ketercapaian organisasi kepada mereka. Selain itu, tunjukkan kepada mereka (donatur) bahwa dana mereka dikelola dengan aman dan terkendali.

Selama ini akuntansi sektor publik khususnya nirlaba seperti yayasan dan masjid belum banyak tersentuh. Akuntansi lebih banyak merambah sektor profit oriented padahal organisasi non profit oriented merupakan organisasi yang sumber dananya diperoleh dari banyak orang yang mempercayakan uangnya dengan ikhlas. Tapi apakah ini disalurkan dengan benar? Inilah yang ingin diketahui masyarakat. Karena itulah, justru organisasi nirlaba semacam ini jauh lebih diprioritaskan pertanggungjawaban informasinya karena menyangkut kepentingan elemen individu yang lebih banyak. Salah satu bentuk pertanggungjawaban itu adalah diperlukannya sebuah akuntabilitas dan transparansi tentang pengelolaan keuangan masjid. Hal tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tahun 2011 yang menyatakan bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporannya kepada para pemakai laporan keuangan.

Praktek akuntansi pada lembaga-lembaga keagamaan atau lembaga Nirlaba lainnya merupakan sesuatu yang tidak lazim. Walaupun tidak lazim, penelitian praktek akuntansi pada lembaga keagamaan seperti gereja banyak dilakukan oleh beberapa peneliti Akuntansi.(Irvine, 2005) menyimpulkan bahwa, Pendeta dan orang awam percaya bahwa akuntansi tidak mengganggu agenda suci yang dikerjakan oleh Gereja, sebaliknya, akuntansi adalah bagian penting yang terintegrasi dengan kepentingan Gereja untuk mencapai misi kudus, karena Gereja berkepentingan dengan

peningkatan dana dan manajemen keuangan yang baik untuk mencapai misinya.(Jacobs & Walker, 2004) menyimpulkan bahwa, berdasarkan teori A Clash of Jurisdictional yang dikemukakan oleh Abbot (1988), terdapat pemisahan wewenang antara masing-masing profesi yang tidak mungkin saling memahami sehingga muncul konflik antara Akuntan dengan Rohaniawan. Teori yang disampaikan (R. C. Laughlin, 1988) yang menyatakan ada pemisahan antara akuntansi sebagai Ilmu sekuler dengan kehidupan keagamaan yang penuh dengan kekudusan mendorong Jurisdictional Conflict tersebut.

Disisi lain, (Jacobs & Walker, 2004) juga mengutip pendapat Eliade (1959) yang menyatakan bahwa bagi seseorang yang sangat religius maka semua sudut pandangnya akan selalu didasari oleh pemahaman spiritual, oleh karena itu maka praktek akuntansinya pun akan dipenuhi dengan dimensi spiritual, sebaliknya bagi seseorang yang tidak religius maka dipersepsikan bahwa akuntansi merupakan ilmu bebas dari pengaruh dimensi spiritual.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara seorang peneliti (dari pengumpulan data sampai analisis data) dalam upaya memberikan jawaban atas permasalahan teoritis atau praksis yang sedang dihadapinya (Triyuwono, 2009). Pemilihan metode penelitian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan berbeda dengan metode penelitian yang digunakan pada akuntansi positif (mainstream) dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk melihat suatu realitas yang nyata dalam suatu gejala sosial yang tidak bisa dijawab dengan menggunakan asumsi-asumsi mekanistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini memiliki perbedaan paradigma yang sangat mendasar sehingga memberikan kebebasan berpikir untuk mendesain suatu konstruksi ilmu pengetahuan

2.1. penelitian kualitatif interpretif

Penelitian ini dilakukan pada lingkup Masjid Syuhada Masamba dengan menggunakan metode

kualitatif karena dengan metode ini data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam dan lebih terpercaya, serta seluruh kejadian dalam suatu konteks sosial yang peneliti ingin teliti bisa ditemukan. selain itu pemilihan metode kualitatif diharapkan mampu memberikan cara pandang baru terhadap akuntabilitas secara menyeluruh (holistik), dengan asumsi bahwa pemahaman akuntabilitas tidak cukup hanya dengan matematis berupa angka (fisik) yang dijabarkan dalam laporan keuangan melainkan dipahami dalam bentuk perilaku individu dalam mengimplementasikan akuntabilitas. Dengan metode kualitatif peneliti juga bermaksud untuk melihat secara langsung fenomena dan realitas akuntabilitas Masjid Syuhada Masamba lebih mendalam dalam aspek yang lebih holistik.

2.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan sesuatu yang berkaitan dengan unit analisis yang akan diteliti. Dapat dikatakan bahwa situs penelitian merupakan bejana sebagai objek peneliti dalam menghali dan menapaki tujuan penelitian, situs penelitian dalam penelitian ini adalah Masjid Syuhada Masamba. Masjid ini beralamat di JL.Jenderal Sudirman Kelurahan Bone Kecamatan Masamba. Pemilihan lokasi studi kasus di masjid ini di latar belakang ketertarikan peneliti untuk melihat lebih dalam bagaimana akuntabilitas dan pengelolaan keuangan masjid tersebut apakah sudah sesuai dengan PSAK 45 tentang akuntansi non-profit.

2.3. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data.

Menurut (Moleong, 2021) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah 1) kata-kata, dan 2) tindakan, sedangkan data lain seperti dokumen pribadi, dokumen resmi, sumber buku, arsip dan majalah ilmiah hanya merupakan data tambahan. Sehubungan dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus (Case Study) maka sumber utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan. Sedangkan untuk memperoleh data tambahan berupa laporan keuangan, dokumen pribadi/resmi, sumber buku, dan surat kabar dilakukan penelaahan atas dokumen-dokumen

relevan yang berhubungan dengan arsip-arsip yang dapat menunjukkan penerapan akuntansi pada Masjid Syuhada Masamba. Untuk memperoleh semua data-data tersebut, peneliti terlibat langsung dalam melakukan wawancara dan juga pengamatan.

2.3.1. Data primer (*Primary data*)

Menurut Sekaran (2006), data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti. Data ini dikumpulkan tidak menggunakan media perantara. Pengumpulan data primer menuntut peneliti untuk terjun langsung dalam obyek penelitian. Hal ini dikarenakan karakteristik dari penelitian kualitatif itu sendiri dimana peneliti menjadi salah satu instrumen penelitian untuk mendapatkan informasi yang valid, data yang akurat dan relevan hal itu menuntut peneliti untuk terjun langsung dalam obyek penelitian.

2.3.2. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Selain data primer yang telah diuraikan di atas, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Terdapat beberapa sumber data sekunder (sources of secondary data), termasuk catatan-catatan atau laporan historis. Data sekunder dalam penelitian ini memiliki kedudukan yang sama dalam data primer. Data sekunder semakin memperdalam pemahaman dan pemaknaan seluruh variabel penelitian yang diakaji.

2.4. Teknik Analisis

Analisi data merupakan upaya mencari dan manata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain (muhajir,2000:142). Penelitian ini dilakukan dengan metodologi Studi Kasus (Case Study) yakni, pengamatan secara detail terhadap obyek atau orang, baik pada satu titik waktu atau beberapa titik waktu. Dengan data yang lebih detail, bervariasi dan komprehensif. Dengan melibatkan data kualitatif, serta menggunakan Logic Analytic. (Smith, 2003) Penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan yakni Masjid yang telah dipilih oleh

peneliti atau dengan cara Purposive Sampling yakni sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan alasan dan tujuan khusus. Pengamatan dilakukan melalui keterlibatan secara langsung terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh obyek penelitian dalam waktu tertentu sehingga diperoleh gambaran utuh tentang praktik akuntansi di entitas pelaporan yakni Masjid, selain itu juga dilakukan wawancara secara tidak terstruktur selama proses pengamatan langsung tersebut.

Teknik analisa yang digunakan yakni *Logic Analytic* yakni menyesuaikan berbagai hasil pengamatan dan wawancara dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yakni, Akuntansi dan Teologi, *Good Governance, Clash of Jurisdictional*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Deskripsi Obyek Penelitian

Masjid Syuhada Masamba yang menjadi objek dalam penelitian ini merupakan masjid yang berdomisili di JL.Jenderal Sudirman Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara. Masjid ini didirikan pertama kali sekitar tahun 2005 memiliki luas tanah 900 m², luas bangunan 2.500 m² dengan status tanah wakaf. Masjid ini dalam pengelolaannya sangat berbeda dengan pengolalan masjid tradisional pada umumnya terlihat dari peran sentral ulama yang tidak terlalu dominan. biasanya pada masjid-masjid tradisional ulama merupakan tokoh yang paling berpengaruh dan mengurus semua aktifitas masjid, mulai dari pengelolaan dana sampai tetek bengenk pengurusan masjid harus dibawah oleh ulama. Pada masjid ini pengelolaan masjid dilakukan oleh pengurus masjid yang terpilih.

3.2. Eksistensi Akuntansi di Masjid Dalam Konteks Teologi Islam

Bagi individu yang otonom, misalnya, akuntansi kemungkinan dipandang sebagai sebuah realitas sosial yang dibangun oleh individu tertentu. (Francis, 1990) menyatakan meskipun sedikit perhatian yang diberikan kepada tingkat mikro (individu, atau diri atau akuntan itu sendiri) tetap menganggap aspek ini sangat krusial. Lebih jauh Francis memaparkan bahwa akuntan memiliki pernaan yang sangat penting sebagai agen moral

dalam wacana etika dan praktek akuntansi. Akuntansi menurut Francis, adalah “praktik moral sekaligus diskruftif” yang terkait dengan dimensi moral (etis) individu. Masjid sebagai entitas akuntansi yang tidak mendapat perhatian dari akuntan maupun ilmuan akuntansi sebenarnya telah membangun persepsinya tersendiri tentang akuntansi. Seperti yang disampaikan ketua Masjid Syuhada Masamba sebagai berikut :

“ masjid syuhada membutuhkan perna akuntansi untuk membuat laporan keuangan pentingnya pelaporan keuangan untuk menghindari kecurigaan dari jamaah dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami selaku pengelola masjid untuk selalu memberikan informasi tentang keadaan keuangan yang kami bacakan setihap hari jumat”¹

Besarnya dana yang berputar di Masjid Syuhada Masamba menuntut untuk di lakukan pengelolaan yang semakin professional namun ini belum dapat dilakukan oleh pengurus masjid karena kurangnya tenaga ahli khususnya dibidang akuntansi yang dapat menilai aset yang dimiliki oleh masjid syuhada.

Berkaitan dengan teologi, pengurus Masjid Syuhada Masamba melalui ketua secara implisit menyebutkan bahwa akuntansi juga memiliki dimensi teologis yang menjadi perintah Allah swt dalam hal ini ketua menyebutkan tentang Amanah. Amanah dalam konteks islam tercermin dalam surah Surat An-nisa’ ayat 58

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Bingkai teologi islam menjadi sangat penting dari praktek akuntansi karena dalam islam seluruh praktik-praktik kehidupan haruslah senantiasa dilandaskan pada alqur’an dan as-sunnah yang menjadi petunjuk dan pegangan hidup ummat islam termasuk dalam hal ini praktik akuntansi. Persepri bahwa akuntansi merupakan produk sekuler yang lebih dekat

dengan kegiatan entitas bisnis tidak dapat dijadikan alasan bagi pengurus untuk menggunakan instrumen akuntansi sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban yang lebih holistik hal ini sejalan dengan pandangan Dhaoudi (1993) dalam Tryuwuno yang berpendapat bahwa dalam islam akan terjadi pertentangan dengan sifat alamiah sesuatu bila memisahkan materi dan jiwa, karena melanggar prinsip islam yang paling mendasar, yaitu tauhid. tetapi hal ini bertentangan dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti seperti yang dilakukan Booth (1993) (Simanjuntak & Januarsi, 2011) yang menjelaskan bahwa pemisahan kehidupan spiritual dan keduniawian menempatkan akuntansi sebagai ilmu yang didasari oleh pemahaman sekuler, hal ini menyebabkan instiusi keagamaan seperti Gereja hanya mentolelir peran akuntansi pada batas mendukung kegiatan spiritual, tidak terintegrasi dalam mendukung tugas-tugas suci keagamaan.

Perbedaan hasil penelitian Both (1993) dengan penelitian di Masjid ini adalah, pengurus Masjid Syuhada Masamba mentolelir penggunaan akuntansi sebagai pelengkap kegiatan pengelolaan masjid. Dikarenakan didorong oleh rasa tanggungjawab dan wujud implementasi amanah dari donatur yang dititipkan kepada pengurus untuk dikelola dengan baik. Hal ini juga mendorong pengurus untuk senantiasa berlaku jujur dan transparan dalam hal pengelolaan keuangan masjid dan juga untuk menghindari prasangka *zuudshon* (berprasangka buruk) dari jamaah dan donator.

Dalam konteks praktek seperti ini akuntansi dijadikan pengurus masjid sebagai *tools* positif secara material dan spiritual dalam konteks teologi islam. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Jacobs & Walker, 2004) yang menjelaskan bahwa akuntansi mampu mendorong kerja entitas keagamaan menjadi lebih baik ketika peran akuntansi di maksimalkan di lembaga keagamaan tersebut. Bahkan, akuntansi menjadi tool untuk memperbaiki kualitas ibadah dan pelayanan kepada umat. Secara teologis, Islam membuka ruang untuk melakukan tafsir yang sesuai dengan konteks zamannya, dimana Islam itu berada.

3.3. Pengelolaan keuangan Masjid dan Akuntabilitas publik

Masjid Syuhada Masamba merupakan masjid yang dikelola secara tradisional. Sumber-sumber keuangan masjid memang masih di dominasi oleh sumbangan para donatur. Laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus masjid memang masih sangat sederhana tapi dalam skala yayasan laporan keuangan telah dibuat sedemikian rupa. Ini disebabkan telah diterapkannya *good governance* yang baik hal ini terlihat telah diterapkannya pemisahan fungsi wewenang.

Akuntabilitas publik menurut (Mardiasmo, 2021) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik tersiri atas dua macam yaitu akuntabilitas vertikal yakni wujud pertanggung jawaban kepada Tuhan dan akuntabilitas horisontal terkait stakeholders, dal alam. Wujud pelaporan keuangan dan akuntabilitas publik dalam rangka pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam setting Masjid Syuhada tercermin dari diumumkannya setiap jum'at jumlah saldo masuk dan keluar yang terjadi selama satu minggu. Temuan diatas menurut peneliti merupakan wujud dari eksistensi dan transparansi yang berusaha diterapkan oleh pengurus masjid.

3.4. Akuntansi Masjid dan *Clash Jurisdictional*

Teori *Clash of Jurisdictional* (Abbott, 1988), menyatakan profesionalitas sebuah profesi seringkali tidak dapat dipahami oleh profesi lainnya yang berbeda, sehingga profesionalitas sebuah profesi teralienasi dari profesi lainnya. Hal ini terjadi karena sistem secara praktik dan nilai memiliki perbedaan antara satu profesi dengan profesi lainnya, masing-masing profesi ingin membuktikan bahwa mereka ahli dan sangat menguasai wilayah profesinya dibandingkan orang lain, sehingga tidak memungkinkan bagi orang lain untuk masuk dan melakukan profesi yang mereka kuasai.

Pada konteks penelitian ini, terdapat dua profesi yang berbeda perspektifnya bahwa ruang kerja, yakni Pertama. Akuntan melalui praktik dan ilmu akuntansi. Kedua. Agamawan/ Ustadz/ Pengurus Masjid dengan peran dan tugasnya dalam kegiatan-kegiatan dakwah dan peribadahan di Masjid Peran akuntansi yang tidak konsisten digunakan dalam Masjid, menyebabkan secara langsung tidak terjadi *clash jurisdictional* justru dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh para pengurus Masjid, mereka membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang secara sukarela mau membantu menghadirkan praktek akuntansi yang praktis dan sesuai untuk pengelolaan keuangan masjid.

Dari sisi, agamawan dan ustadz tidak terlihat adanya penolakan terhadap eksistensi akuntansi digunakan secara benar di masjid, justru mereka mendorong pemamfaatan akuntansi, karena sadar bahwa Islam mengajarkan kejujuran dan keterbukaan serta semua aktivitas terhadap sesama manusia harus dapat dipertanggung jawabkan. Permasalahan justru muncul dari para akuntan atau ilmuan akuntansi yang memiliki kecenderungan untuk tidak bersedia masuk kedalam entitas ini, hal ini dilatarbelakangi oleh miskinnya pemahaman teologi yang dimiliki oleh para akuntan, seperti yang disinyalir oleh Jacob (2004) juga mengutip pendapat penelitian Eliade (1959) yang menyatakan bahwa, "Bagi seseorang yang sangat religius maka semua sudut pandangnya akan sesuatu selalu didasari oleh pemahaman spiritual, oleh karena itu maka praktek akuntansinya pun akan dipenuhi dengan dimensi spiritual, dan sebaliknya.

4. KESIMPULAN

Dalam konteks kontruksi budaya di Masjid Syuhada Masamba, akuntansi dapat diterima dengan baik sebagai instrumen yang penting bagi pengelolaan masjid sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban . akuntansi juga merupakan bagian integral dari pemahaman teologi islam yang dapat memperbaiki kualitas ibadah hal ini tercermin dari konteks amanah yang di usung para pengelola masjid.

Laporan keuangan masjid dilakukan masih terbilang seerhana. Dengan bentuk empat kolom yakni uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo.

Clas Jurisdictional tidak terjadi pada kasus Masjid Syuhada Masamba. Justru pengurus dan pengelola masjid dan yayasan serta ustad dan jamaah masjid mendorong dan menginginkan kehadiran profesi akuntan untuk mendisain penggunaan akuntansi yang baik dan benar dalam pengelolaan keuangan masjid agar mampu membantu memperbaiki kinerja masjid dari dalam dan mampu melakukan peran-peran dakwah dan pembangunan konstruksi sosial ditengah masyarakat islam. Namun, persepsi individu akuntan yang berpikir sebagai akuntan *meanstream* yang kebanyakan yang tertarik mengembangkan diri dan akuntansi pada domain entitas *meanstream* yakni entitas komersial menjadi *barrier* pengembangan akuntansi pada entitas akuntansi yakni masjid.

5. REFERENSI

- Abbott, A. (1988). *The system of professions: an essay of the division of expert labour*, Chicago, U. of Chicago Press.
- Amerieska, S., Irianto, G., & Affandy, D. P. (2017). AKUNTABILITAS PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL DITINJAU DARI PERSPEKTIF SHARI'ATE ENTERPRISE THEORY. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss1.art3>
- Eliade, M. (1959). *The sacred and the profane: The nature of religion* (Vol. 81). Houghton Mifflin Harcourt.
- Francis, J. R. (1990). After virtue? Accounting as a moral and discursive practice. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 3(3), 0.
- Guthrie, J. (1998). Application of Accrual Accounting in the Australian Public Sector - Rhetoric or Reality. *Financial Accountability and Management*, 14(1), 1–19. <https://doi.org/10.1111/1468-0408.00047>
- Guthrie, J., & Johnston, M. (1994). Commercialisation of the public sector: why, how and for what? A prospective view. In *Governance and economic efficiency* (pp.

- 87–108). Ceda.
- Irvine, H. (2005). Balancing money and mission in a local church budget. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 18(2), 211–237.
<https://doi.org/10.1108/09513570510588733>
- Jacobs, K., & Walker, S. P. (2004). Accounting and accountability in the Iona Community. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 17(3), 361–381.
<https://doi.org/10.1108/09513570410545786>
- Laughlin, R. (1995). Methodological themes Empirical research in accounting alternative approaches and a case for “middle-range” thinking. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(1), 63–87.
<https://doi.org/10.1108/09513579510146707>
- Laughlin, R. C. (1988). Accounting in its Social Context: An Analysis of the Accounting Systems of the Church of England. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 1(2), 19–42.
<https://doi.org/10.1108/EUM0000000004622>
- Lewis, N. (1995). Public Sector Accounting Centre of Excellence. *Melbourne: Australian Society of Certified Practising Accountants*.
- MA, R., & Mathews, R. (1993). Financial reporting by government departments: ED55-a dissenting view. *Australian Journal of Corporate Law*, 3(1), 67–88.
- Mardiasmo. (2021). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
<https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ>
- Mathews, M. R. (1997). Twenty-five years of social. In *Accounting, Auditing & Accountability Journal* (Vol. 10, Issue 4).
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasi, G., & Steccolini, I. (2008). Implementation of accounting reforms. An empirical investigation into Italian local governments. *Public Management Review*, 10(2).
<https://doi.org/10.1080/14719030801928573>
- Simanjuntak, D. A., & Januarsi, Y. (2011). Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*.
- Smith, R. C. (2003). Analytic strategies for oral history interviews. *Inside Interviewing: New Lenses, New Concerns*, 348.
- Triuwono, I. (2001). Metafora Zakatdanhari’Ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari’Ah. *Jaai Volume*, 5(2), 131–145.
- Wilson, E. R., & Kattelus, S. C. (2001). Implications of GASB’s new reporting model for municipal bond analysts and managers. *Public Budgeting and Finance*, 21(3), 47–62. <https://doi.org/10.1111/0275-1100.00042>